

Apa Itu Program SKALA?

December 2024



SKALA merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.



Program SKALA memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung dan mendorong kemitraan lintas sektor untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar dalam hal desentralisasi.



Program SKALA berupaya memperkuat manajemen keuangan publik agar alokasi sumber daya fiskal lebih merata, berkelanjutan, dan didukung oleh data yang lebih berkualitas serta sistem yang mendorong proses pengambilan keputusan berbasis informasi.



Program ini menekankan pentingnya kesetaraan gender, penyandang disabilitas, dan inklusi kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan.



Program SKALA juga memanfaatkan hasil dan pembelajaran dari dukungan Kemitraan Australia-Indonesia untuk program desentralisasi sebelumnya di Indonesia.

Wilayah Kerja Kami



Tujuan Kami



Membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

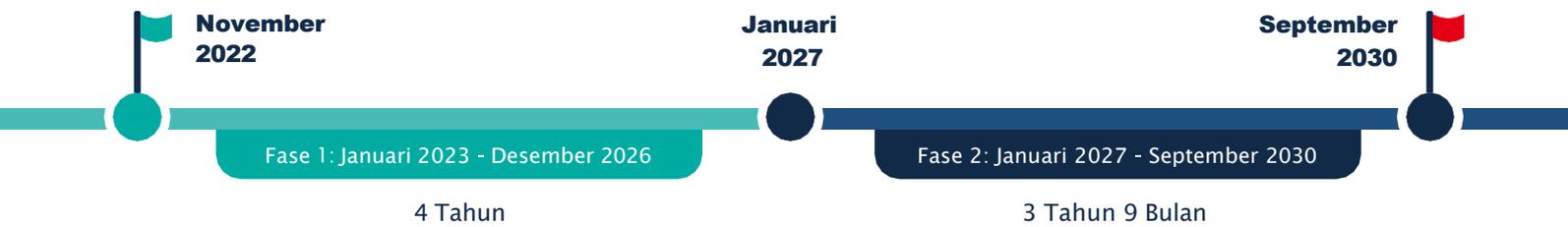
Mitra Kami



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, sepuluh provinsi, serta berbagai organisasi masyarakat sipil dan universitas.

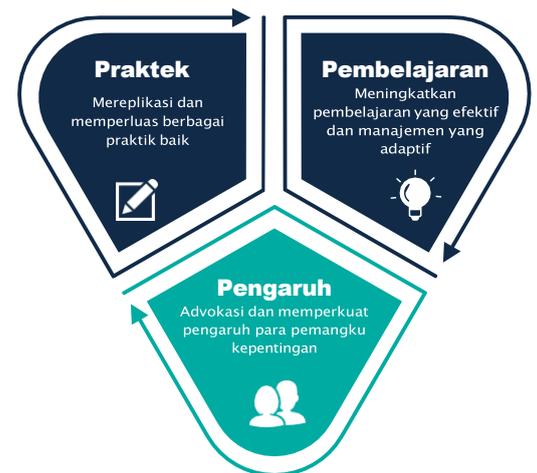
Periode Program

- Periode program SKALA akan berlangsung selama delapan tahun yang terbagi dalam dua fase (2022-2026 & 2027-2030).
- Dimulai pada November 2022 dengan anggaran mencapai AUD 160 juta.
- Perjanjian Subsider (*Subsidiary Agreement*) Program SKALA ditandatangani pada Bulan Maret 2024



Pendekatan Kami

Program SKALA berfokus pada penguatan sistem tata kelola, meliputi perencanaan, penganggaran, dan administrasi, yang menjadi landasan penyediaan layanan yang efektif. Dengan mengatasi tantangan sistemik dan meningkatkan proses tata kelola pemerintahan, Program SKALA bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan penyediaan layanan dasar yang inklusif, sehingga sumber daya publik dapat lebih efektif menjangkau kelompok miskin dan rentan. Program SKALA diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama yaitu **Praktek**, **Pembelajaran**, dan **Pengaruh** (3P).



Fokus Kami

- 1 Data dan Analitik**
Ketersediaan dan pemanfaatan data terkait kelompok rentan dan kebutuhan layanan dasar mereka, serta penguatan interoperabilitas sistem informasi pemerintah untuk mendukung analisis dan perencanaan yang
- 2 Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)**
Partisipasi, representasi, dan pengaruh perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- 3 Standar Pelayanan Minimum**
Kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyediakan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif.
- 4 Manajemen Keuangan Publik**
Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan layanan yang inklusif.

Capaian Program



Capaian Akhir 1:

Kondisi Pemampu yang Lebih Kuat bagi Penyediaan Layanan Dasar di Daerah

Capaian Antara

- IO1:** Kementerian/lembaga memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
- IO2:** Kementerian/lembaga menggunakan bukti/data dalam memperkuat perencanaan, koordinasi, dan penentuan prioritas desentralisasi.
- IO3:** Kementerian/lembaga meningkatkan pemanfaatan analisis dan bukti terkait GEDSI dalam proses pengembangan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran guna memastikan pemenuhan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.



Capaian Akhir 2:

Penyediaan Layanan Dasar yang Lebih Baik di Daerah

Capaian Antara

- IO4:** Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran mampu mengelola keuangan publik dengan lebih baik untuk meningkatkan layanan dasar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- IO5:** Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran memperkuat pemanfaatan bukti/data mengenai kebutuhan layanan dasar dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran.
- IO6:** Pejabat kunci di provinsi dan kabupaten sasaran makin memahami, mampu mengukur dan merencanakan penyediaan layanan dasar yang sesuai kebutuhan seluruh masyarakat.



Capaian Akhir 3:

Partisipasi, Representasi dan Pengaruh yang Lebih Kuat dari Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya

Capaian Antara

- IO7:** Memperkuat pemerintah dalam pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.
- IO8:** Meningkatkan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan lainnya dan/atau perwakilannya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.
- IO9:** Sistem informasi di daerah menghasilkan analisis yang lebih akurat tentang kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sehingga memastikan penyediaan layanan dasar yang lebih inklusif.

Tata Kelola Program



Program SKALA dikelola oleh Komite Pengarah yang diketuai bersama oleh Bappenas (Pemerintah Indonesia) dan DFAT (Pemerintah Australia). Kelompok kerja teknis melibatkan 25 direktorat di tiga kementerian (Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan) untuk memastikan implementasi program berjalan secara berkesinambungan dan selaras dengan sistem pemerintahan. Komite Program Provinsi, yang diwakili oleh sepuluh provinsi mitra, bertugas memastikan bahwa rencana dan kebutuhan daerah terintegrasi dalam pelaksanaan program.

Mitra Kementerian/Lembaga

Kementerian	Kedeputan/Direktorat Jenderal	Direktorat Teknis
BAPPENAS	Kedeputan Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
		Direktorat Ketenagakerjaan
		Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
	Kedeputan Bidang Pembangunan Regional	Direktorat Regional I
		Direktorat Regional II
		Direktorat Regional III
Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Direktorat Pembangunan Daerah	
	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	
KEMENKEU	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Direktorat Dana Transfer Umum
		Direktorat Dana Transfer Khusus
		Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
		Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
		Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KEMENDAGRI	Sekretariat Jenderal	Pusat Fasilitas Kerjasama
		Pusat Data dan Informasi
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat II
	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
	Direktorat Jenderal Bina Otonomi Daerah	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD
	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
		Direktorat Pendapatan Daerah
Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah		
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)		Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



IFC Tower 2, Level 17
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

skala.or.id communications@skala.or.id

